

PENGARUH PENGAWASAN INTERN, PERENCANAAN, DAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA SKPD PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIGI

Novita Lerly Djiloy

novitalerlydjiloy@gmail.com

Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

The Influence of Internal Control, Planning, and The Implementation of regional finance accounting system influence the performance of officials in Sigi Governmental institutions; 2) significant influence of internal control, planning, and the implementation of regional finance accounting system on the performance of officials in Sigi governmental institutions; 3) significant influence of internal control on the performance of Governmental intitutions in Sigi; 4) significant influence of planning on the performance of Governmental institutions in Sigi; 5) significant influence of the implementation of regional finance accounting on the performance of Governmental institutions in Sigi. The study means to verify the relationships of variables by including 42 respondents who selected by census method. The result can be concluded that: 1) internal control, planning, and the implementation of regional finance accounting system simultaneously have significant influence the performance of officials in Sigi governmental institutions; 2) internal control significantly influences the performance; 3) planning has insignificant influence on the performance of officials in Sigi governmental institutions; 4) the implementation of regional finance accounting significantly influences the performance of Governmental institutions in Sigi.

Keywords: *internal control, planning, the implementation of regional finance accounting, and performance of the governmental institution*

Masyarakat dewasa ini menuntut akan terwujudnya *good government governance* dan pelaksanaan organisasi sektor publik yang efektif, efisien, transparan, akuntabel yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme membutuhkan peran dari pengawasan internal, pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik. Di dalam pelaksanaannya *good governance* bukan hanya ditujukan pada pemerintah pusat namun pada pemerintah daerah juga dituntut untuk melaksanakan *good governance* agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan sehat di setiap lini pemerintahan.

Di Indonesia, pemerintah daerah diberi kewenangan dalam mengelola dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri atau yang biasa dikenal dengan istilah otonomi daerah. Hal ini di atur dalam TAP MPR Nomor

XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 sebagai dasar penyelenggaraan Otonomi Daerah (Mardiasmo, 2002). Serta direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian mengalami perubahan lagi menjadi UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah. Sejak di berlakukannya otonomi di bidang keuangan maka, pemerintah daerah dituntut agar dapat memberikan pertanggungjawabannya atas Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Didalam pelaksanaan Otonomi Daerah perlu adanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas (Bastian 2002, dalam Primadona 2011). Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*), pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, salah satunya dengan penyempurnaan sistem administrasi negara secara menyeluruh (LAN 2000 dalam Primadona 2011). Salah satu cara yang ditempuh pemerintah dengan menerbitkan dan menyempurnakan perangkat peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan negara/daerah (Rohman, 2007). Keberhasilan sebuah organisasi tidak dapat diukur semata – mata dari pespektif ke uangan. Surplus atau defisit dalam laporan keuangan tidak dapat menjadi tolak ukur keberhasilan. Karena sifat dasarnya yang tidak mencari profit, keberhasilan sebuah organisasi sektor publik juga harus diukur dari kinerjanya (Mardiasmo, 2004).

Hakikat Pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Menurut Sabeni dan Gozali (1997) dalam Sukmana dan anggarsari (2009) mendefinisikan Pengawasan Intern Merupakan suatu alat pengawasan dari pimpinan organisasi yang bersangkutan untuk mengawasi apakah kegiatan-kegiatan bawahannya telah sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditentukan.

Tata kelola pelaksanaan Pemerintah yang baik dari suatu negara merupakan suatu keharusan yang tidak dapat di abaikan. Pemerintah wajib menerapkan kaidah-kaidah yang baik untuk menjalankan roda Pemerintahan, salah satunya yaitu kaidah-

kaidah dalam bidang pengelolaan keuangan. Untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik menjadi alasan mengapa Pemerintahan Republik Indonesia melakukan Reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan berdasarkan sistem akuntansi keuangan, dalam pelaksanaan sistem ini tidak ada jaminan bahwa terdapat kesalahan atau penyimpangan sehingga diperlukan peranan pengawasan intern yang memadai yaitu dari atasan lngsung kepada bawahannya. Pengawasan intern inilah yang dapat memberikan bantuan untuk memverifikasi transaksi-transaksi sehingga dapat ditelusuri dana-dana sesuai dengan tujuannya, kemudian mengecek otoritas, efisiensi dan keabsahan pembelajaran dana. Oleh karena itu, pemerintahan perlu mempunyai sistem akuntansi yang bukan hanya berfungsi sebagai alat pengendalian transaksi keuangan, akan tetapi juga sebagai suatu sistem akuntansi keuangan yang hendaknya mendukung pada pencapaian kinerja. Karena penilaian Pemerintahan yang baik dapat terlihat dari pencapaian kinerja Pemerintahan itu sendiri. Pengukuran dalam pencapaian kinerja sangat penting dalam menilai akuntabilitas organisasi dan manager dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. (Sukmana dan Anggarsari, 2009).

Selain pengawasan intern dan pelaksanaan sistem akutansi keuangan daerah, faktor perencanaan juga mempengaruhi kinerja organisasi publik. Perencanaaan strategis berguna bagi perencanaan untuk perubahan dalam lingkungan dinamik yang kompleks. Perencanaan strategik adalah proaktif, sehingga organisasi publik disarankan untuk proaktif mencari dan melakukan perubahan, dan bukannya bersikap reaktif terhadap situasi. Perencanaan strategi Berguna untuk pengelolaan hasil-hasil *managing for results*. Perencanaan strategik merupakan suatu alat manajerial yang penting. Sektor publik diharapkan untuk memfokuskan perhatian pada pencapaian dan peningkatan *outcomes*

setiap tahun. Dengan kata lain, hasilhasil seyogianya mulai difokuskan pada efisiensi dan efektivitas operasional. Perencanaan strategik memungkinkan sektor publik mengembangkan suatu sistem yang memfasilitasi peningkatan terus menerus *continuous improvement* pada semua tingkat dalam manajemen organisasi. Gaspersz (2007).

Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Semester I Tahun 2014 mengungkapkan bahwa masih adanya kelemahan dalam SPI (Sistem Pengendalian Intern). Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain yaitu pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat, proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, perencanaan kegiatan tidak memadai, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja, penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan, dan entitas tidak memiliki SOP (Standar Operasional Produksi) yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK tersebut terdapat 10 kasus yang menunjukkan kelemahan SPI. Kasus-kasus tersebut yaitu terdapat pada Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan dengan jumlah 3 kasus dan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja dengan jumlah 7 kasus (IHPS BPK RI, 2014). Hal ini membuktikan bahwa satuan pengawasan intern, pengelolaan keuangan daerah, dan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah yang ada tidak berjalan optimal sesuai SOP. Faktor utama yang melatarbelakangi kelemahan unsur tersebut adalah sumber daya manusia itu sendiri, dalam hal ini pengawasan

intern pada organisasi pemerintahan sangat dibutuhkan keberadaannya guna membenahi dan meminimalisir kasus serupa.

Dari uraian diatas maka judul penelitian ini adalah “Pengaruh Pengawasan Intern, Perencanaan dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi”.

Pengawasan intern adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau manajer puncak dan atau pimpinan atau manajer unit atau satuan kerja dilingkungan organisasi dan atau unit atau satuan kerja masing-masing (Nawawi, 2002). Sedangkan Pengertian pengawasan intern menurut Mulyadi (2001) dalam Primadona (2011) adalah: “Pengawasan intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”.

Menurut Dalton dalam Jhingan (2014) perencanaan ekonomi dalam pengertian yang paling luas adalah pengaturan dengan sengaja oleh orang yang berwenang mengenai sumber-sumber kegiatan ekonomi kearah tujuan yang ditetapkan.

Sistem akuntansi keuangan adalah suatu sistem pengelolaan keuangan yang baik dalam rangka mengelola dana dengan system desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat luas (Bastian dan Soepriyanto, 2002).

Menurut Rohman (2007) kinerja pemerintah daerah adalah: “merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Secara umum dapat dikatakan juga bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam periode tertentu”.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Pengawasan Intern, Perencanaan dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi.
2. Pengawasan Intern berpengaruh signifikan terhadap Kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi
3. Perencanaan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi.
4. Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi.

METODE

Jenis penelitian yang akan digunakan untuk menganalisis penelitian mengenai “Pengaruh Pengawasan Intern, Perencanaan dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi” adalah jenis penelitian penjelasan (*explanatory/confirmatory research*), karena penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel dengan melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tertentu (Sugiyono, 2014). Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah metode sensus, yaitu penyebaran kuesioner dilakukan pada semua populasi. Populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu seluruh SKPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Sigi yang terdiri dari 42 SKPD. Responden yang di pilih dalam penelitian ini yaitu Pimpinan SKPD, selaku atasan yang memiliki wewenang dalam

melakukan pengawasan langsung terhadap bawahannya dalam lingkup internal SKPD yang dipimpinnya.

Pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis regresi berganda, dengan program SPSS 17.0 model regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut adalah sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Y= Kinerja SKPD

β_0 = Intersep (atau kontanta α)

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien regresi

X_1 = Pengawasan Intern

X_2 = Perencanaan

X_3 =Pelaksanaan Sistem Akuntansi

E= *Error Time*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Regresi Linear Berganda merupakan salah satu alat statistik Parametrik dengan fungsi menganalisis dan menerangkan keterkaitan antara dua atau lebih faktor penelitian yang berbeda nama, melalui pengamatan pada beberapa hasil observasi (pengamatan) di berbagai bidang kegiatan. Berkaitan dengan penelitian ini alat analisis Statistik Parametrik Regresi Linear Berganda yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variable indeviden (X_1, X_2 dan X_3) terhadap variable dependen (Y). Dalam konteks penelitian ini Regresi Linear Berganda digunakan untuk mengukur pengaruh Pengawasan Intern (X_1), Perencanaan (X_2) dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_3) terhadap Kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi.

Melalui hasil analisis Regresi Linear Berganda dengan menggunakan bantuan komputer *SPSS For Wind Release 17,0* diperoleh hasil-hasil penelitian dari 42 orang responden dengan dugaan pengaruh ketiga variabel independen (pengawasan internal, perencanaan dan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah) terhadap kinerja SKPD

Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi dapat diketahui hasil perhitungan senbagai berikut:

Tabel 1. Hasil Perhitungan Regresi Berganda

Dependen Variabel Y = Kinerja				
Variabel	Koefisien regresi	Standar Error	T	Sig
C = Constanta	0,060	0,449	0,134	0,894
X1 = Pengawasan Intern	0,619	0,133	4,661	0,000
X2 = Perencanaan	-0,180	0,113	-1,587	0,121
X3= Pelaksanaan Sistem Akuntansi	0,552	0,132	4,171	0,000
R = 0,902 F-Statistik = 55,175				
R-Square = 0,813 Sig. F = 0,000				

Sumber: Hasil Regresi

Model regresi yang diperoleh dari tabel diatas adalah:

$$Y = 0,060 + 0,619X_1 + (-0,180X_2) + 0,552X_3$$

Persamaan diatas menunjukkan, bahwa variabel independen yang dianalisa berupa variabel (X_1 dan X_3) memberi pengaruh terhadap variabel dependen (Y) sedangkan variabel independen berupa variabel (X_2) tidak memberi pengaruh terhadap variabel dependen (Y) model analisis regresi Kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi dapat dilihat sebagai berikut:

Menurut persamaan diatas dapat dijelaskan:

1. Untuk nilai constanta sebesar 0,060 berarti kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi sebelum adanya variabel independen adalah sebesar 0,060.
2. Pengawasan Intern (X_1) dengan koefisien regresi 0,619 ini berarti adanya pengaruh yang positif antara pengawasan intern dan kinerja SKPD pemerintah Daerah. Maka dapat di artikan semakin baik pengawasan intern yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi maka akan semakin baik pula kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi.
3. Perencanaan (X_2) dengan koefisien regresi - 0,180 ini berarti adanya pengaruh yang negatif antara perencanaan dan kinerja SKPD Pemerintah Daerah. Maka dapat di artikan bahwa tidak terdapat pengaruh perencanaan terhadap kinerja SKPD pemerintah Daerah Kabupaten Sigi.

4. Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_3) dengan koefisien regresi 0,552 ini berarti adanya pengaruh yang positif antara pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah dan kinerja SKPD pemerintah Daerah. Maka dapat di artikan semakin baik pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi maka akan semakin baik pula kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi.

a. Pengujian Hipotesis Pertama

Uji simultan adalah sebuah pengujian untuk mengetahui apakah variabel independen (X) yang diteliti memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Y) berarti semua variabel bebasnya, yakni Pengawasan Intern (X_1), Perencanaan (X_2) dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_3) dengan variabel tidak bebasnya Kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi.

Berdasarkan uji determinasi (kehandalan model) memperlihatkan nilai $R^2 = 0,813$. Hal ini berarti bahwa sebesar 81,30% variabel tidak bebas dipengaruhi oleh ketiga variabel bebas, selebihnya variabel tidak bebas dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti seperti Pengawasan eksternal, Kompetensi dan komitmen aparatur, serta sumber daya manusia.

Selanjutnya berdasarkan tabel 4.70 dari hasil perhitungan diperoleh Fhitung = 55,175

pada taraf nyata $\alpha = 0,05$ atau $P < 0,05$. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi Probabilitas = 0,000. Sehingga dapat dinyatakan bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel tidak bebasnya. Dengan demikian maka hipotesis pertama yang menyatakan bahwa: “Secara simultan pengawasan intern, perencanaan, dan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi” berdasarkan hasil Uji-F ternyata *terbukti*.

b. Pengujian Hipotesis Kedua, Ketiga dan Keempat

1. Pengawasan Intern (X_1)

Untuk variabel pengawasan intern, hasil perhitungannya menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi sebesar 0,619, sementara tingkat signifikansi sebesar 0,000. Dengan demikian nilai $P < 0,05$ pada taraf kepercayaan 95%. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel pengawasan intern mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi. Dengan hipotesis kedua yang menyatakan” Secara parsial pengawasan intern berpengaruh signifikan terhadap Kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi” berdasarkan hasil Uji-t ternyata *terbukti*.

2. Perencanaan (X_2)

Untuk variabel perencanaan, hasil perhitungannya menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi sebesar -0,180, sementara tingkat signifikansi sebesar 0,121. Dengan demikian Nilai koefisien regresi ini tidak signifikan pada tingkat signifikansi 0,05. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel perencanaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi. Dengan hipotesis ketiga yang menyatakan” Secara parsial perencanaan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten

Sigi” berdasarkan hasil Uji-t ternyata *tidak terbukti*.

3. Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_3)

Untuk variabel pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah, hasil perhitungannya menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi sebesar 0,552, sementara tingkat signifikansi sebesar 0,000. Dengan demikian nilai $P < 0,05$ pada taraf kepercayaan 95%. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi. Dengan hipotesis keempat yang menyatakan” Secara parsial Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi” berdasarkan hasil Uji-t ternyata *terbukti*.

Pembahasan

Penelitian ini menguji pengaruh Pengawasan Intern, Perencanaan, dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi keuangan Daerah terhadap Kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi dengan pembahasan sebagai berikut :

1. Pengaruh Pengawasan Intern, Perencanaan, dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi

Analisis di atas dapat pula diinterpretasikan bahwa setiap peningkatan pelaksanaan pengawasan intern, perencanaan dan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah akan memberikan peningkatan kinerja SKPD di lingkungan pemerintah daerah kabupaten sigi. Pengawasan intern (meliputi: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan), perencanaan (meliputi: proses penyusunan dan pelaksanaan), dan pelaksanaan sistem

akuntansi keuangan daerah (meliputi: pencatatan, penggolongan/pengklasifikasian, dan pelaporan) yang dilaksanakan dengan baik sesuai aturan yang berlaku maka dapat menekankan asumsi-asumsi penyimpangan perilaku dan sebagai prosedur yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam organisasi dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta yang dimiliki pemerintah, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi dalam usaha dan membantu mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan, sehingga pengelolaan keuangan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan berdasarkan PP 58 tahun 2005 dapat terlaksana dengan baik pula sesuai dengan visi, misi, tujuan maupun sasaran yang diinginkan sebagai bentuk pencapaian kinerja SKPD Pemerintah Kabupaten Sigi.

Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan pendapat Sukmana dan Anggarsari (2009) mengatakan bahwa:

“Dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik itulah Pemerintahan Republik Indonesia melakukan Reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan sistem akuntansi keuangan, pelaksanaan sistem ini tidak ada jaminan bahwa terdapat kesalahan atau penyimpangan sehingga diperlukan suatu metode pengawasan intern yang memadai dan dapat memberikan bantuan untuk memverifikasi transaksi-transaksi agar dapat ditelusuri dana-dana sesuai dengan tujuannya, serta mengecek otoritas, efisiensi dan keabsahan pembelajaran dana. Oleh karena itu, pemerintahan perlu memiliki sistem akuntansi yang tidak saja berfungsi sebagai alat pengendalian transaksi keuangan, akan tetapi sistem akuntansi keuangan tersebut hendaknya mendukung pada pencapaian kinerja. Karena penilaian Pemerintahan yang baik dapat dilihat dari pencapaian kinerja Pemerintahan itu sendiri,

pengukuran dalam pencapaian kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manager dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik”.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini menerima hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Pengawasan Intern, Perencanaan dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi.

2. Pengaruh Pengawasan Intern Terhadap Kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi

Analisis di atas dapat pula diinterpretasikan Semakin baik pengawasan Intern maka semakin baik pula kinerja SKPD-nya. Pengawasan intern dimaksudkan untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi rencana kerja apabila ada kesalahan-kesalahan dalam penerapannya. Pengawasan intern yang baik akan meminimalisasikan adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama proses pelaksanaan tugas. Pengawasan intern bertujuan untuk mendorong terwujudnya pertanggung jawaban atas pelaksanaan program/kegiatan yang semakin lama semakin baik dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas KKN serta *good governance*. Pengawasan intern harus diarahkan pada terciptanya transparansi dan akuntabilitas yang bercirikan pada penerapan *good governance* secara penuh. Pengawasan penting untuk diterapkan dengan maksud untuk menguji dan mengevaluasi apakah pengelolaan keuangan pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pengawasan intern dimaksudkan untuk membantu manajemen melaksanakan tanggung jawabnya dalam mencapai kinerja secara efektif.

Dari hasil penelitian yang diperoleh untuk variabel pengawasan intern memperlihatkan bahwa Pengawasan Intern

berpengaruh signifikan terhadap Kinerja SKPD. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawasan internal sudah cukup terlaksana dengan baik dalam operasionalnya. Pengawasan internal yang baik akan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang dihasilkan oleh SKPD. Dalam kenyataan di SKPD Pemerintah Kabupaten Sigi telah memaksimalkan pengawasan internal dan hal ini telah mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah tersebut. Jadi apabila pengawasan intern baik maka hasil kinerja operasional pemerintah daerah juga akan maksimal dan jika dilihat dari tanggapan responden mengenai variabel pengawasan intern, pengaruh pengawasan intern terhadap kinerja pemerintah daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten sigi sudah optimal.

Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan pendapat Menurut Rohman (2009) mengatakan bahwa: “Pengawasan intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, dan membantu para anggota organisasi dalam melaksanakan tanggung jawab secara efektif dan mencapai kinerja yang lebih baik. Fungsi pengawasan intern memonitor apakah perilaku sudah berorientasi pada pencapaian kinerja yang baik, dan melakukan koreksi atau perilaku dan hasil yang menyimpang dari kinerja yang diinginkan”. Sedangkan Menurut Sukmana dan Anggarsari (2009) mengatakan bahwa: “Pengawasan intern berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah daerah. Hal ini menunjukan bahwa pengawasan intern dapat memberikan dukungan terhadap responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas Pemerintah. Semakin baik pengawasan intern yang dilaksanakan akan memberikan dampak semakin baik kinerja pemerintah daerah yang dicapai”.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini menerima hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Pengawasan Intern berpengaruh signifikan terhadap Kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi.

3. Pengaruh Perencanaan Terhadap Kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi

Analisis di atas dapat pula diinterpretasikan bahwa perencanaan daerah kabupaten sigi selama ini masih rendah. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya perencanaan daerah tersebut rendah, yaitu karena Dalam pelaksanaan perencanaan tidak didukung SDM yang memadai, SDM yang bertugas kurang memiliki pengetahuan di bidang perencanaan, kurangnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pergantian kepala daerah mengakibatkan program perencanaan sebelumnya belum terlaksana seutuhnya sudah terjadi perubahan pada perencanaannya, dan dalam proses penganggaran pemerintah daerah mengalami keterlambatan didalam pengesahan perda APBD sehingga menghambat jalannya program/kegiatan. Perencanaan yang tidak jelas dan tidak realistis merupakan bentuk dari kegagalan dalam perencanaan. Kurangnya pemahaman akan teknik perencanaan menjadi pemicu terjadinya keraguan dalam memproses perencanaan anggaran. Faktor-faktor inilah yang menjadi penyebab perencanaan daerah tersebut rendah sehingga tujuan akhir yaitu pada pencapaian kinerja pemerintah daerah tidak terlaksana dengan baik. Menurut Mardiasmo (2002) lemahnya perencanaan anggaran yang diikuti ketidakmampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan. Hal ini menunjukan perencanaan anggaran yang tidak baik juga akan memperburuk pelaksanaan anggaran baik dalam proses penatausahaan keuangan maupun dalam pelaporan. Hal ini juga di tentukan dalam penelitian ini yang mana proses perencanaan yang dipengaruhi oleh faktor politik dan bukan faktor kebutuhan riil akan proses pelaksanaan anggaran kinerja. Temuan ini dapat dimaklumi karena perancanaan yang dilakukan umumnya tidak sesuai dengan realita sehingga pihak SKPD dan pengambilan

kebijakan akan mencari kebenaran atas apa yang mereka lakukan, sehingga mereka akan merasakan kesulitan dalam pertanggungjawaban. Lebih lanjut Mardiasmo (2002) menyatakan kinerja SKPD daerah harus bertumpu pada kepentingan publik bukan atas tekanan politik. Hal ini harus terlihat pada porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik dan besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah.

Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan pendapat Santoso dalam Darwanis dan Abdullah (2013) mengatakan bahwa “Kinerja pemerintah daerah selama ini masih rendah. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya kinerja pemerintah daerah tersebut rendah, diantaranya karena sistem pengelolaan keuangan daerah yang masih lemah dimulai dari proses perencanaan dan penganggaran APBD, pelaksanaan/penatausahaan APBD, pertanggung jawaban yang berupa pelaporan hasil pelaksanaan APBD serta pengawasan. Dalam proses penganggaran, pemerintah daerah selalu mengalami keterlambatan didalam pengesahan perda APBD. Keterlambatan ini menyebabkan banyak program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan untuk tahun anggaran berjalan sehingga terjadi keterlambatan pembangunan daerah”. Sedangkan menurut Indriani Yulia Friska (2014) mengatakan bahwa “Berdasarkan hasil uji parsial, dengan melihat signifikansinya diketahui bahwa variabel implementasi anggaran dan pelaporan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan dua variabel lain, yaitu perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja tidak berpengaruh”.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak menerima hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa Perencanaan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi.

4. Pengaruh Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan daerah Terhadap Kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi

Analisis di atas dapat pula diinterpretasikan bahwa Semakin baik pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan daerah maka semakin baik pula kinerja SKPD-nya. Oleh karena itu, Pegawai dalam instansi pemerintah daerah seharusnya memahami tentang pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah karena sistem akuntansi merupakan alat pertanggungjawaban pemerintah dalam menjalankan amanah rakyat dalam mengelola keuangan daerah yaitu APBD dengan sebaik mungkin. Sehingga program/kegiatan yang dijalankan dapat terealisasi. Dari hasil jawaban responden tentang Variabel Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara keseluruhan masih terletak pada kriteria yang baik, maka pemerintah daerah diharapkan dapat lebih meningkatkan pemahamannya tentang pelaksanaan sistem akuntansi terutama dalam pengelolaan aset, pelaporan keuangan dan memahami prosedur yang harus dilakukan untuk menjembatani kas basis keakrual basis. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pentingnya sistem akuntansi yang baik, sehingga tujuan demi kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana, karena dengan sistem akuntansi dapat mengendalikan para pelaku pengambil kebijakan ekonomi yaitu pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi agar dapat dinikmati oleh masyarakat.

Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan pendapat menurut Jones, dalam Afiah 2009 mengatakan bahwa “Sistem informasi akuntansi dalam sistem perencanaan dan pengendalian sektor publik mempunyai arti dan peran penting terkait pada fungsinya dalam pengukuran dan pengendalian. Dalam fungsi pengukuran, akuntansi melakukan proses pengumpulan, pencatatan realisasi pendapatan dan belanja serta transaksi-

transaksi yang terjadi diluar pendapatan dan belanja, serta aktivitas pelaporan. Selanjutnya akan dapat digunakan sebagai pengukur kinerja ekonomis, efisiensi, dan efektivitas pemerintah daerah. Sistem akuntansi yang dirancang secara baik, akan menjamin dilakukannya prinsip *stewardship* dan *accountability* dengan baik pula". Menurut Sukmana dan Anggarsari (2009) mengatakan bahwa "Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pun secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah artinya sistem akuntansi keuangan daerah dapat menimbulkan dukungan yang kuat terhadap Kinerja Pemerintah Daerah yang dicapai".

Oleh karena itu, hasil penelitian ini menerima hipotesis keempat yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan penulis pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pengawasan internal, perencanaan, dan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah pada umumnya telah dilaksanakan dengan baik oleh SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi.
2. Pengawasan intern, perencanaan, dan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja SKPD pemerintahan daerah kabupaten sigi. Dimana semakin baik pengawasan intern, perencanaan, dan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah maka akan semakin baik pula kinerja SKPD pemerintahan daerah kabupaten sigi dan sebaliknya, semakin tidak baik pengawasan intern, perencanaan, dan pelaksanaan sistem
3. Variabel pengawasan intern mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja SKPD pemerintah daerah kabupaten sigi. Pengawasan intern pada pemerintah daerah kabupaten sigi secara keseluruhan sudah sangat baik. Berdasarkan lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan sudah termasuk dalam kategori sangat baik.
4. Variabel perencanaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja SKPD pemerintah daerah kabupaten sigi. Perencanaan pemerintah daerah kabupaten sigi secara keseluruhan masih dalam katogori rendah. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya perencanaan daerah tersebut rendah, diantaranya karena Dalam proses perencanaan tidak didukung SDM yang memadai, SDM yang bertugas kurang memiliki pengetahuan di bidang perencanaan, kurangnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pergantian kepala daerah mengakibatkan program perencanaan sebelumnya belum terlaksana seutuhnya sudah terjadi perubahan pada perencanaannya dan dalam proses penganggaran pemerintah daerah mengalami keterlambatan didalam pengesahan perda APBD sehingga menghambat jalannya program/kegiatan.
5. Variabel pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja SKPD pemerintah daerah kabupaten sigi. pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah pada pemerintah daerah kabupaten sigi secara keseluruhan sudah sangat baik. Berdasarkan pencatatan, penggolongan/pengklasifikasian, dan pelaporan sudah termasuk dalam kategori sangat baik.

Rekomendasi

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengawasan intern, perencanaan, dan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah Terhadap kinerja SKPD pemerintah daerah kabupaten sigi, maka penulis akan memberikan beberapa saran yang dapat digunakan oleh SKPD Pemerintah daerah kabupaten sigi sebagai berikut:

1. Pengawasan intern terhadap pegawai pada Pemerintah daerah kabupaten sigi sebaiknya dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi dengan cara pimpinan selalu memonitor dan mengontrol kerja para pegawainya agar semua kerja dapat terkontrol dengan baik.
2. Perencanaan pemerintah kabupaten sigi masih rendah, sebaiknya pemerintah daerah lebih memperhatikan sumber daya manusia yang ada. Tempatkan pegawai-pegawai yang cakap dan telaten dibidang perencanaan serta perbanyak sosialisasi maupun bimtek untuk mendapatkan pegawai-pegawai yang cakap dan telaten dalam perencanaan.
3. Pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah secara keseluruhan sudah baik. Namun dalam pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah, selain mempersiapkan sistem yang baik hendaknya sumber daya manusianya harus terlebih dahulu dipersiapkan. Apabila menggunakan sumber daya manusia yang telah ada maka terlebih dahulu dilakukan pendidikan dan pelatihan untuk memberikan pengetahuan yang cukup, mengenai sistem secara terprogram dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah.
4. Pada dasarnya kinerja SKPD pemerintah daerah kabupaten sigi sudah baik. Namun untuk lebih meningkatkan kinerja pemerintah daerah sebaiknya penempatan pegawai disesuaikan dengan pendidikannya, dan lebih memperhatikan pegawai yang berprestasi dengan cara memberikan penghargaan sehingga mereka

memiliki motivasi untuk lebih giat lagi bekerja dan kemudian memberikan hukuman kepada pegawai yang melanggar untuk menciptakan efek jerah.

5. Bagi Penelitian selanjutnya, wilayah penelitian bisa lebih diperluas tidak hanya di kabupaten sigi, menambah jumlah sampelnya, dan memasukkan variabel independen lain yang belum dikaji dalam penelitian ini seperti: Sumber daya manusia, pengawasan eksternal, Kompetensi dan komitmen aparatur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. H. Djayani Nurdin, S.E, M.Si selaku Ketua Tim Pembimbing dan Dr. M. Ikbal A., S.E., M.Si, Ak selaku Anggota Tim Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya serta memberi masukan dan petunjuk dalam proses pembimbingan selama ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Afiah, Nunuy Nur. 2009. Pengaruh Kompetensi Anggota DPRD dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi. October 2009 Research Days. Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran: Bandung.
- Bastian, I. dan Soepriyanto. 2002. *"Sistem Akuntansi Sektor Publik: Konsep Untuk Pemerintah Daerah"*. Salemba Empat: Jakarta.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Darwanis dan Abdullah. 2013. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Perangkat Daerah Di Pemerintah Aceh. Jurnal Akuntansi vol. 2 no. 1 hal: 27-36.
- Efendy, Muh. Taufiq. 2010. Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Motivasi

- Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Tesis* tidak diterbitkan. Semarang: Program Pascasarjana Diponegoro Semarang.
- Friska, Indriani Yulia. 2014. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating. Melalui <http://online-journal.unja.ac.id> [06/01/16].
- Gapersz, Vincent. 2000. *Sistem Manajemen Kinerja Terintegrasi Balanced Scorecard Dengan Six Sigma Untuk Organisasi Bisnis Dan Pemerintah*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Edisi 3. BP Universitas Diponegoro Semarang.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah Edisi pertama*. Salemba Empat: Jakarta.
- Jhingan M.L. 2014. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Sektor Publik*. Andi Offset: Yogyakarta.
- Ponamon, Irene Fransisca. (2013). Pengaruh Pengawasan Intern dan Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Pemerintah Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* Vol. 9 No. 2 hal: 68-80.
- Primadona, Almada (2011). Pengaruh Pengawasan Intern dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Penelitian Pada Pemerintah Kota Bandung). Melalui http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/620/jbptunikompp-gdl-alamandapr-30969-13-unikom_a-l.pdf [12/11/14].
- Ratnawati Juli dan Arnold Petrus (2011), Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah, Dan Fungsi Pemeriksaan Intern Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal dian* Vol. 11 no. 2 hal: 182-191.
- Republik Indonesia, 2004. *Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia, 2014. *Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. 1983. *Instruksi presiden No. 15 tahun 1983, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Presiden Republik Indonesia*.
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005, tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah*.
- Rohman, Abdul. 2007. Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Maksi* Vol 7 No.2 hal: 206-220.
- Rohman, Abdul. 2009. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan Dan Kinerja Pemerintah Daerah (Survei Pada Pemda Di Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi & Bisnis* Vol.9 No.1 hal: 21-32.
- Sabeni, A. dan Gozali, I. 1995. *Pokok-pokok Akuntansi Pemerintahan*. Edisi 4. Yogyakarta. BPFE.
- Sugiyono. 2014. *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta: Bandung.
- Sukmana, W. dan Anggarsari, L. 2009. Pengaruh Pengawasan Intern Dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survei pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota

Tasikmalaya). Jurnal Akuntansi FE
Unsil Vol. 4 No. 1 hal: 576-585.

Ulum, Ihyaul. 2004. *Akuntansi sektor publik:
Suatu Pengantar*. Bumi Aksara: Jakarta.